

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Z. Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- E Utrecht, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000.
- Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Laden Marpaung, *Asas-asas Teori praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marwan Effendi, *Peradilan in Absentia Dan Koneksitas*, Timpani, Jakarta, 2009.
- Mety Rahmawaty, *Dasar-Dasar Penghapus Penuntutan, Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku 1*, Alumni 1982, Bandung.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Telah Dikupas Kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda*, Balai Lektor Mahasiswa, Bandung, 1969.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 2003.
- Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Edisi kedua, sinar Grafika, Cetakan ke-12, Jakarta, Desember, 2009.

B. Undang-undang

Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik dan Profesi POLRI.

Peraturan Pemerintah RI No 42 TAHUN 2010 tentang Hak-hak Anggota Kepolisian RI.

Perkap No 7 Tahun 2005 Tentang Bantuan Hukum Pada Anggota POLRI.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Sumber Lain

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/42/IX/ 2004 tentang Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/ 2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;